

WALIKOTA NEW YORK, KETIMPANGAN DAN PEMILU 2014

RINGKASAN

- **Setelah dua puluh tahun** dikendalikan kubu Republik pro-bisnis, angin perubahan berhembus di kota New York. Kota yang dulunya percaya bahwa *"Greed is Good"* kini dipimpin oleh walikota baru Bill de Blasio, dan program utamanya adalah mengatasi **Ketimpangan** (*inequality*).
- Keprihatinan terhadap ketimpangan **telah meluas-mendunia**, ini berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Tidak terbatas kepada kalangan aktivis dan akademisi, tetapi juga tokoh agama, Paus Franciskus, kelompok bisnis *World Economy Forum*, hingga IMF, Presiden Obama di masa pemerintahan kedua, UNDP dan UNICEF.
- **Ketimpangan Indonesia telah naik** dalam kurun 10 tahun terakhir. Para Capres dan Caleg Indonesia perlu bersikap dan memiliki rencana untuk mengatasinya. **Pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar** bebas di Indonesia selama 10 tahun ini terbukti tidak menurunkan Ketimpangan. Justru menaikkan. Peran pemerintah sangat penting. Pemerintah dapat melaksanakan 3 aksi sekaligus: perubahan Kebijakan, Kelembagaan dan Akuntabilitas
- **Dua kali pemilu Indonesia 2004 dan 2009**, tema Ketimpangan belum pernah dibahas dan diperdebatkan oleh para Caleg dan Capres. Padahal, implikasinya masalahnya nyata, konkret dan dialami oleh banyak warga negara.
- **Pilihan bagi Capres** dan Caleg untuk mengatasi Ketimpangan antara lain :
 - (a) Penurunan Ketimpangan menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam RPJM lima tahun mendatang, disamping penurunan kemiskinan dan pengangguran: menurunkan indeks Gini dari 0.41 menjadi 0.35 dalam waktu lima tahun:
 - (b) **Memperbaiki kebijakan dan perolehan pajak** hingga 19%-24% PDB terutama memacu perolehan pada sektor *Pajak Penghasilan (PPh) kelompok SuperKaya dengan tarif pajak (Pph) baru hingga 45%* untuk memastikan sumbangan kelompok Superkaya;
 - (c) **Realokasi Subsidi BBM** untuk universalisasi manfaat Jaminan Sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ketenagakerjaan untuk semua warga
 - (d) **Memperkuat wewenang dan sumberdaya** lembaga pemerintah: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

ANALISIS INFID disusun sebagai bahan masukan kepada para calon presiden dan calon legislatif Indonesia yang akan berkampanye dan dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilu 2014 ini serta pengambil kebijakan.

Bahan-bahan penulisan berdasarkan sumber-sumber media dan kajian yang dapat dipercaya. Kesimpulan dan rekomendasinya diupayakan dapat diuji dan diperdebatkan.

Tujuannya untuk menyuarakan suara dan usulan-usulan kelompok masyarakat sipil Indonesia dan warga negara yang memimpikan politik yang cerdas dan berbasis program dan menginginkan pembangunan yang lebih Inklusif, untuk semua dan melindungi hak asasi manusia.

Tim penyusun:

Sugeng Bahagijo, Arief Anshory Yusuf, Hamong Santono, Dwi Ruby Khalifah, Yanuar Nugroho, Siti Khoirun Nikmah

**** Diperkenankan untuk mengutip dengan menyebut judul dokumen dan nama penyusun.**

NEW YORK, NEW YORK.

Selain menjadi markas PBB dan kota-yang-tak-pernah-tidur, New York identik pula sebagai pusat Keuangan dunia. Tak pelak, Wall Street menjadi *icon* utama. Gordon Gekko dalam film *Wall Street* (1987) yang diperankan aktor Michael Douglas termasyhur dengan petuahnya “Greed is Good” (Serakah adalah Baik).

Namun demikian, sepertinya identitas itu akan mulai berubah. Bukan tidak mungkin, New York akan menjadi kota perubahan. Sejak 2014, New York akan dipimpin oleh walikota baru. Ini merupakan perubahan politik besar. Karena, selama dua puluh tahun kota-yang-tak-pernah-tidur ini telah dikelola oleh tokoh-tokoh pro-bisnis dari Republik, Rudy Guilani dan Michael Bloomberg.

Kini, New York dipimpin oleh Walikota baru, Bill de Blasio, dari Demokrat. Bill de Blasio, 52 tahun menjadi walikota yang ke 109. Salah satu rencana utama adalah mengatasi ketimpangan di kota New York. Dia akan bekerja selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Memimpin New York bukan pekerjaan sepele. Bahkan, beberapa penulis menyatakan bahwa pekerjaan berat kedua sesudah presiden Amerika adalah menjadi walikota New York.

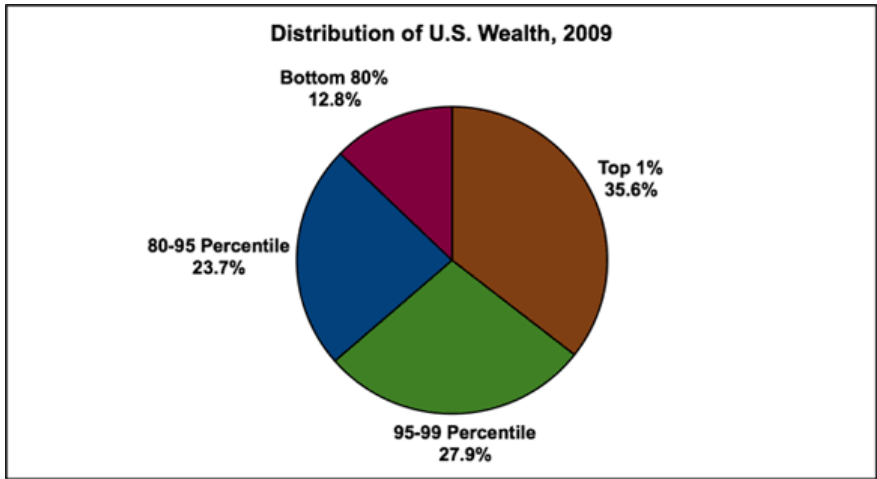
Dengan penduduk lebih dari delapan juta dan dengan jumlah pegawai 350 ribu orang, kota New York dan jabatan walikota adalah barometer politik di AS. Presiden Franklin Delano Roosevelt yang terkenal dengan New Deal dan menjadi pemenang Perang Dunia II adalah walikota New York, sebelum terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) selama empat kali.

Walikota baru Bill de Blasio telah berjanji akan mengatasi kisah Dickensian Dua Kota (Kaya-Miskin) yang menjadi ciri kota New York selama ini. Perubahan-perubahan akan dilakukan sehingga “Warga New York akan merasa bahwa kota New York bukanlah hanya menjadi milik 1 % warga tetapi kota semua warga untuk bekerja, hidup dan membina keluarga”.

Perubahan-perubahan itu antara lain adalah rencana menaikkan pajak untuk dialokasikan kepada perbaikan kualitas kehidupan golongan tidak mampu. Kenaikan pajak akan dilakukan kepada warga kaya, mereka yang berpendapatan 500 ribu hingga satu juta dolar per tahun. Perolehan dana akan digunakan untuk memajukan pendidikan anak usia dini (pre-kindergarten).

Mengapa Ketimpangan? Bukankah AS merupakan negara adi daya, kaya, makmur dan maju?. Data dan statistik berkata lain. Sementara di New York dan AS berkumpul Miliarwan dan Superkaya dunia, namun seperempat penduduk, kelompok pendapatan terendah tidak mengalami peningkatan pendapatan sejak 25 tahun terakhir. Sebaliknya kalangan 1% terkaya justru meningkat tiga kali, dan meraup 20% kekayaan nasional.

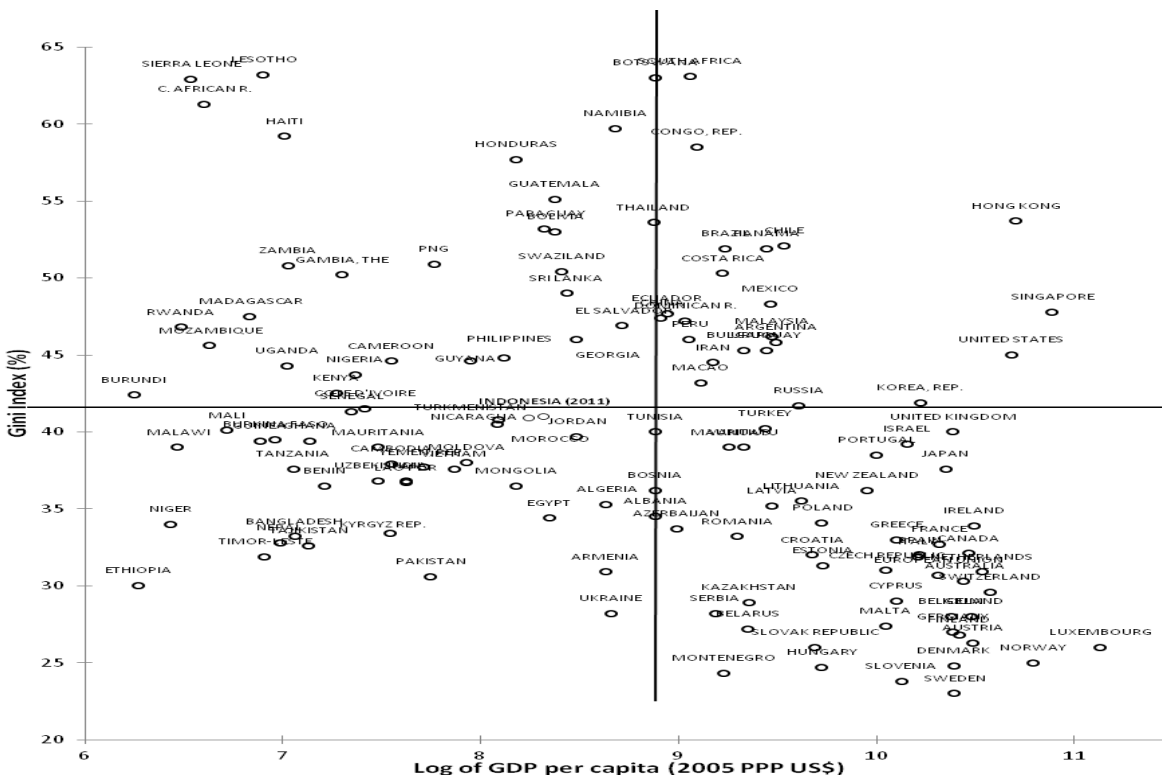
Kemajuan teknologi dan globalisasi (relokasi industri untuk mencari biaya tenaga murah dan lokasi industri yang murah) ikut menyumbang ketimpangan. Dulu di tahun 1979, pabrikan mobil General Motors memiliki 850 ribu pekerja. Hari ini, Microsoft memiliki 100 ribu pekerja saja diseluruh dunia. Google memiliki 50 ribu dan Facebook lima ribu pekerja. Film *Capitalism: A Love Story* (2009) oleh Mick Moore antara lain menceritakan berpindahnya pabrik mobil dimana ayahnya dulu bekerja.



sumber : Economic Policy Institute, The State of Working America 2011, "Wealth Holdings Remain Unequal in Good and Bad Times."

AS memang termasuk negara dengan Ketimpangan tertinggi di antara negara-negara maju. Peta Ketimpangan di antara negara-negara kaya memperlihatkan bahwa negara-negara maju sendiri terdiri dua model : (a) Ketimpangan Tinggi dan (b) Ketimpangan Rendah. Ketimpangan tertinggi dialami oleh Inggris, AS, Portugal dan Singapura; Ketimpangan Rendah adalah Swedia, Jepang dan Norwegia. (www.equalitytrust.org.uk)

Gambar berikut menunjukkan bahwa di antara AS berada pada level negara kaya tetapi dengan ketimpangan tinggi. AS berada di kuadran kanan atas, sementara negara-Negara Kesejahteraan berada di kuadran kanan bawah yaitu negara-negara dengan pendapatan tinggi tetapi memiliki ketimpangan yang rendah. Indonesia sendiri berada di kuadran kiri atas yaitu negara dengan pendapatan rendah dan ketimpangan tinggi.



Sumber: CIA World Fact Book

Kegalauan atas Ketimpangan bukan saja disuarakan oleh Walikota New York. Sebelumnya, pada bulan Desember 2013, dalam sebuah Pidato, Presiden Obama telah menyatakan, mengatasi Ketimpangan merupakan “tantangan utama” dan dia akan sungguh memfokuskan diri untuk soal ini.

Obama menguraikan bukti-bukti mengapa ini penting: “Kelompok 10 terkaya tidak saja telah memperoleh sepertiga dari pendapatan kita, kini mereka meraup separuh. Di masa lalu rata-rata CEO menerima 20-30 kali lipat (dibanding) pendapatan rata-rata pekerja, kini mereka menerima 273 kalinya. Dan, para keluarga dari kelompok 1 persen memiliki kekayaan 288 kali ketimbang rata-rata keluarga di AS”

Tidak berhenti pada kaum politisi. Tahun lalu, Kelompok bisnis global, yang diwakili oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economy Forum*) menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan yang parah (*severe income disparity*) menjadi satu resiko utama di dunia (*Global Risk 2013*). Wajar jika WEF risau, karena ada dua hal yang besar dan berat bertemu: ekonomi yang lesu dan kesenjangan pendapatan akan menjadi bumbu yang memicu ledakan sosial. Karena itu para pemimpin dunia dari berbagai kalangan termasuk kelompok bisnis dan pemerintahan perlu diingatkan. [*Global Risk, 2014*]

Panel para ahli dan pemimpin dunia yang dibentuk oleh Sekjen PBB, dalam Laporan HLPEP untuk rencana kerja pembangunan paska 2015, “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*” dalam analisisnya menyatakan bahwa Ketimpangan merupakan masalah besar. Bahkan, banyak pihak yang menganjurkan agar Ketimpangan perlu menjadi pokok utama dari agenda dan kerja-kerja pembangunan pasca-2015, sesudah MDGs berakhir tahun 2015.

Keprihatinan tentang ketimpangan tidak saja disuarakan akademisi dan aktivis, tetapi bahkan tokoh agama. Sri Paus Francis dalam dokumen “*Evangelii Gaudium*” (2013) telah menyerukan agar ketimpangan menjadi perhatian dunia. Dalam dokumen berisi 50.000 kata tersebut, Sri Paus Francis telah menyuarakan kritik yang tegas tentang ketimpangan ekonomi sebagai akibat dampak pasar bebas dan teori “*trickle down*” yang menurutnya tidak terjadi. (*Washington Post, 11/27/13*)

Di sisi lain, dunia juga dibanjiri berita dan analisis tentang naiknya sebuah blok ekonomi baru, yang dapat menggantikan negara-negara maju (G7) dan yang dipandang menjadi sumber dan penggerak ekonomi: negara-negara yang tergabung ke dalam BRICS dan juga yang disebut sebagai *emerging economies*. Namun bersamaan dengan itu, Ketimpangan di hampir semua negara itu juga meninggi. Hanya di Brazil Ketimpangan mengalami penurunan signifikan.

OECD telah membuat pemetaan tentang gejala ini, termasuk sebab-sebab menajamnya ketimpangan pendapatan di Argentina, Brasil, dan juga Indonesia. Oxfam dan lembaga penelitian BRICSAM yang berbasis di Brasil telah melakukan pemetaan perihal Ketimpangan di negara-negara BRICSAM. Dan di Indonesia, Arief Anshory dari Universitas Padjajaran telah menyelenggarakan penelitian perihal ketimpangan ini. (lihat Lampiran 2 dan 3)

Buku *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better* yang terbit tahun 2009 telah laris manis terjual 150.000 dan sedang menunggu terjemahan 23 bahasa lain di luar bahasa Inggris. Buku yang ditulis oleh Kate Pickett dan Richard Wilkinson itu memperlihatkan bagaimana ketimpangan telah menimbulkan dampak sosial negatif seperti : menurunnya kepercayaan kepada orang lain, meningkatnya perasaan keterpinggiran dan penyakit, serta memicu perilaku konsumsi yang berlebihan

Ekonom terkenal yang pernah menjadi Chief Economist Bank Dunia, Joseph Stiglitz pada tahun 2012 menerbitkan buku *the price of inequality* yang mengingatkan bahwa di AS kelompok 1% pendapatan tertinggi mengendalikan 40% aset nasionalnya. Stiglitz juga menunjukkan bahwa ketimpangan tinggi ini membuat Amerika tidak lagi menjadi tanah pengharapan dan generasi yang akan datang akan terancam kehidupan dan penghidupannya.

Di berbagai negara, ada upaya yang meningkat oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mempelajari dan mengatasi Ketimpangan. Di Inggris ada lembaga *Equality Trust* yang, antara lain, membuat panduan bagi anak muda untuk ikut serta menurunkan Ketimpangan. Di Eropa, terdapat lembaga *Luxembrog Income Studies* yang menyajikan panel data antara negara untuk menjadi bahan kajian dan perumusan kebijakan. Juga terdapat lembaga *Inequality Watch*, yang kajian dan pemantauan dan penelitian tentang Ketimpangan (www.inequalitywatch.eu).

Di AS, mantan Menteri Tenaga Kerja Robert Reich bahkan membuat film *"Inequality for All"* untuk menggugah perhatian publik mengenai gawatnya masalah ketimpangan di sana. Mirip dengan film yang dibuat oleh Al Gore, hanya saja film yang satu ini lebih berfokus pada soal Ketimpangan.

Yang menarik adalah sebuah program "Wealth for Common Good" yang diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies -IPS. Program ini bertajuk **"1% untuk ekonomi yang bermanfaat untuk semua"** beranggotakan 2% terkaya yang melakukan advokasi (surat, petisi, bicara dengan kongres, dll) kepada kelompok superkaya AS dan mendorong kebijakan perpajakan yang adil kepada kelompok superkaya. Kelompok mulia ini antara lain beranggotakan Warren Buffet, orang superkaya nomer satu di AS. (www.ineqaulity.org).

Ketimpangan di Indonesia

Kisah Indonesia sedikit banyak dapat dipotret dengan kisah dua kota Charles Dickens (*Tale of Two Cities*). Namun, sajak WS Rendra kiranya lebih pas untuk memotret Indonesia.

Seonggok jagung di kamar/ dan seorang pemuda tamat SLA/Tak ada uang/tak bisa menjadi mahasiswa/hanya ada seonggok jagung

Ia melihat dirinya terlunta-lunta/ ia melihat dirinya ditendang dari discotique/ia melihat sepasang sepatus kenes di balik etalase/ia melihat saingannya naik sepeda motor/ia melihat nomor-nomor lotere/ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal

(Sajak Seonggok Jagung dari "Potret Pembangunan Dalam Puisi, 2008, BurungMerak Press)

Kedua penggal sajak itu ditulis dan mencerminkan kerisauan tahun 1970an. Ketika dua kali mahasiswa dan kaum oposan berupaya mengoreksi kebijakan pembangunan, yaitu peristiwa Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1978.

Hari-hari ini, relevansi sajak itu dapat ditarik dari berbagai hal-hal yang hampir tiap hari disaksikan: mulai dengan mobil mewah yang ditangkap oleh KPK, hingga perumahan mewah yang diiklankan TV. Ada yang berhasil menempuh pendidikan tinggi, dan ada yang bekerja di pabrik dengan sistem kontrak/outsourcing atau bekerja sebagai buruh migran Malaysia. Ada yang *jobholder* dan *jobless*, dan mereka yang tinggal di Pondok Indah dan di Pondok Gede.

Indonesia telah melahirkan kelompok Superkaya dari panen ekonomi dan komoditas seperti Pertambangan, Batubara dan Sawit, Multimedia dan IT dan Keuangan (lihat Lampiran 5). Di sebaliknya, Indonesia-yang-lain masih belum beranjak dari pondok derita dan kemiskinan. Tidak heran jika, seiring dengan pertumbuhan ekonomi positif selama 10 tahun terakhir, Ketimpangan pendapatan di telah menaik, dari level 0.33 menjadi 0.41.

Data-data Ketimpangan yang diolah oleh para ahli ekonomi pembangunan dari Universitas Pajajaran (www.keberpihakan.org) menyebutkan bahwa : (i) Pada tahun 2012, Koefisien Gini kota Jakarta (ukuran ketimpangan) mencapai 0.42; (ii) Pada tahun 2012, 20% kelompok terkaya menikmati 49% pendapatan nasional, (naik dari level 40% pada tahun 2002). Sementara 40% kelompok termiskin menikmati 16% pendapatan nasional (turun dari 20% pada tahun 2002). (iii) 10% penduduk terkaya mengalami

peningkatan pendapatan 12 kali lipat dibandingkan dengan 10% termiskinan (naik dari level 9.6 kali pada tahun 2007).

Jakarta ternyata bukan satu-satunya kota dengan ketimpangan kronis. Kota Bandung juga mengalami peningkatan ketimpangan yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi Bandung yang pesat (9% per tahun) ternyata dibarengi dengan peningkatan ketimpangan yang sangat tinggi. Salah satu cirinya adalah dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi. Jika pertumbuhan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata dan dinikmati hanya segelintir orang saja maka pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata juga akan cenderung tumbuh lebih pelan. Ini terjadi karena orang-orang kaya dan super kaya tersebut akan cenderung menyimpan penambahan pendapatannya sebagai tabungan daripada mengkonsumsinya. Akibatnya, pertumbuhan pendapatan akan cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan konsumsi. Indikasi ini sudah cukup terbukti.

Dengan menggunakan data SUSENAS dapat ditunjukkan bahwa kenaikan ketimpangan pendapatan di kota Bandung pada periode 2007 sampai 2012 termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Jika pada tahun 2007, indeks Gini kota Bandung (ukuran ketimpangan pendapatan standar) adalah sebesar 0.37, pada tahun 2012 meningkat menjadi 0.47. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 0.41 (Arief Anshory Yusuf, *Pikiran Rakyat*, 8 Januari 2014).

Kegentingan soal Ketimpangan ini dapat dilihat dari data berikut ini. (i) angka kematian ibu Indonesia yang paling tinggi di ASEAN dan juga di antara negara-negara berpendapatan menengah (*middle income countries*) sementara Kue Ekonomi Indonesia (PDB) jauh melampaui Malaysia, Singapura dan Thailand; <ii> Kualitas SDM Indonesia seperti terlihat dalam pendidikan rata-rata angkatan kerja Indonesia, masih setara SD-SMP, sementara kompetisi ekonomi dan pasar kerja, khususnya yang bergaji layak, di dalam negeri maupun di luar negeri yang didorong oleh pasar bebas akan bertumpu dan dimenangi oleh mereka dengan pendidikan tinggi, keterampilan tinggi dan kesehatan.

Ketimpangan dapat dilihat dalam tiga cara. Dengan menggunakan Indeks Gini, Dengan melihat rasio antara lapisan pendapatan dan juga dengan Indeks Palma. (lihat Lampiran 1). Ketimpangan juga dapat diukur dengan perbedaan peluang sosial ekonomi atau kesempatan sosial yang dialami oleh lapisan atau golongan penduduk, antara laki-laki dan perempuan (lihat Lampiran 2). Ketimpangan berkaitan dengan Kemiskinan, meskipun keduanya berbeda. Pencegahan Ketimpangan dan Kemiskinan memerlukan strategi dan program yang berbeda (Lihat Lampiran 5).

Tanda-Tanda KETIMPANGAN di Indonesia

Aspek	Status
• Upah/Gaji Terendah dibanding tertinggi	Upah Minimum Tertinggi (DKI): 2,5 juta vs gaji direksi Bank BUMN : 250 juta. Gap: 200 kali lebih
• Pelayanan Kesehatan	Sedikitnya 50-75 juta warga tidak memiliki Asuransi Kesehatan
• Perumahan	Sedikitnya 2 juta perumahan dibutuhkan oleh warga
• Pelayanan Pendidikan	12 juta anak putus sekolah
• Pelayanan airbersih dan Sanitasi	100 juta warga tidak memiliki akses
• Dana Pensiun	Hanya 10% yang memiliki/dilindungi dana pensiun Khususnya mereka yang lahir tahun 1960an
• Kualitas angkatan kerja	65% berpendidikan SD dan SMP

Penyebabnya beragam tetapi kiranya dapat ditunjuk beberapa hal yang selama ini disebut-sebut telah ikut menyumbang kenaikan Ketimpangan tersebut: **Pertama**, masih lemahnya peranan pajak dan kebijakan fiskal dalam membuat perbedaan atau perbaikan pada pendapatan warga (pendapatan pasar kerja). Ini berbeda dengan di negara-negara maju yang sistem perpajakan dan transfernya sangat berpengaruh pada pendapatan warga (jaminan sosial, tunjangan keluarga, subsidi pendidikan, dll).

Kedua, masih lemahnya peran pemerintah dalam memediasi kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini tampak pada berbagai (a) kemudahan dan penundaan kebijakan upah minimum; (b) pembiaran praktik outsourcing yang merugikan pekerja; (c) tiadanya skema tunjangan pengangguran. Di sisi lain, (d) pemerintah tidak membatasi batas atas besaran gaji dan tunjangan CEO dan pejabat tinggi sektor keuangan dan perbankan, baik sektor swasta maupun perusahaan plat merah (BUMN)

Ketiga, masih lemahnya keterwakilan kaum perempuan. Keterwakilan kaum perempuan Indonesia baru mencapai angka 18%. Jauh dari target nasional 30%. Keterwakilan kaum perempuan yang memadai dalam politik di banyak negara terbukti telah ikut cenderung memajukan kecukupan belanja sosial dan pelayanan publik yang lebih baik. Misalnya saja di negara-negara Skandinavia

Keempat, peran pemerintah masih lemah dalam mengatur dan menentukan kualitas dan capaian pelayanan publik khususnya berkenaan dengan kualitas, dan akses pelayanan publik dasar seperti air minum, kesehatan dan pendidikan. Di era otonomi daerah selama 15 tahun, pemerintah tidak menentukan batas minimum untuk pelayanan publik (melindungi). Sebaliknya, pemerintah juga tidak menerapkan batas maksimum belanja birokrasi dan belanja politik di 400 lebih pemerintah daerah (membatasi). Padahal, Pelayanan publik ini sangat menentukan nasib anak atau kaum muda memperoleh pendidikan, dan akhirnya mobilitas sosial.

Benar bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Namun berbagai program dan kebijakan sosial Indonesia sebagian besar masih bersifat residual atau minimalis. Kinerja sistem jaminan sosial Indonesia dapat disebut sebagai “widefare” ketimbang “welfare” karena nilai dan besaran manfaatnya minimal. Akibatnya, tindakan dan niat baik itu kurang efektif dan kurang berdampak menurunkan ketimpangan.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program sosial, akan tetapi, program-program tersebut tidak efektif mengatasi Ketimpangan. Pendanaan untuk subsidi BBM, Subsidi Pupuk dan benih, Raskin, BOS, PNPM, Jampersal dan PKH berniat baik akan tetapi barangkali masih bermasalah.

Ketimpangan dan Capres

Baru-baru ini, sebuah artikel penting telah dilansir di Amerika oleh seorang ahli ekonomi. Artikel itu itu ditulis oleh Vikram Nehru (2013) dan diterbitkan oleh Carnegie Endowment, sebuah lembaga penelitian terkemuka. Nehru menulis bahwa Indonesia bisa naik kelas menjadi negara kaya dan maju dengan pendapatan di atas **12.600 dolar** per kapita pada tahun 2035.

Artinya, selama 20 tahun ke depan, pendapatan Indonesia melompat menjadi empat kali dibanding tahun 2013 (3.500 USD). Hal ini mungkin terjadi melihat kinerja Indonesia pada periode 1968-1998, yang tumbuh rata-rata 7,8 persen.

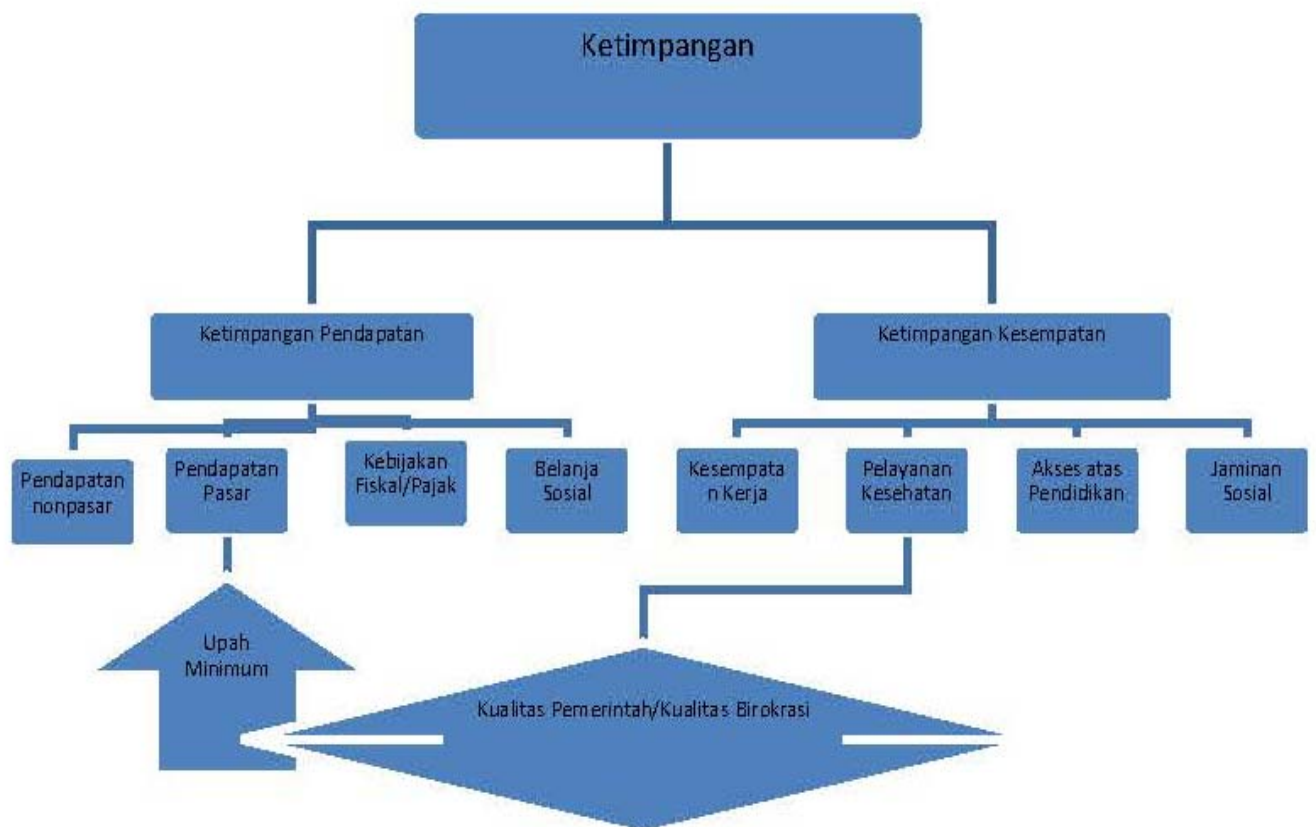
Disisi lain, Nehru menyatakan bahwa pemerintah baru nanti perlu memprioritaskan lima agenda, salah satunya adalah menurunkan **Ketimpangan**, terutama ketimpangan kesempatan: pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya. Agenda prioritas lain adalah penguatan industri manufaktur, pembangunan infrastruktur, melindungi lingkungan hidup, pendidikan berkualitas.

Tidak berlebihan jika anjuran untuk mengurus Ketimpangan telah diangkat tinggi menjadi tugas seorang Presiden. Tidak sekadar diserahkan kepada seorang menteri atau bahkan seorang Gubernur dan Walikota. Juga tidak berlebih bila Ketimpangan diusulkan menjadi prioritas pembangunan Indonesia ke depan, sejajar dengan Pendidikan dan Infrastruktur.

Ada apa gerangan? Dan, siapakah Calon presiden yang akan melakukannya? Sebab, selama ini, topik Ketimpangan belum pernah menjadi bahan perdebatan dalam dua pemilu Indonesia tahun 2004 dan 2009. sudah waktunya para Caleg dan Capres yang hendak dipilih rakyat membahas dan memiliki posisi dan rencana bagaimana mereka akan mengatasinya.

Namun demikian, menurunkan ketimpangan bukanlah hal baru bagi Indonesia. Pada periode 2011-2013, setidaknya fraksi PDIP telah mengusulkan agar keberhasilan pembangunan diukur juga dengan seberapa jauh Ketimpangan/gini rasio diturunkan. Di RPJM masa SBY (2009-2014) masalah ketimpangan memang tidak/belum menjadi ukuran keberhasilan pemerintah. Presiden dan parlemen atau institusi politik sangat berperan. karena di tangan Presiden dan menteri APBN ditentukan. Juga karena Presiden dan Bank Indonesia (BI) sangat mempengaruhi keseimbangan antara tujuan untuk stabilitas harga/pengendalian inflasi dengan target menurunkan pengangguran/stimulus

Mekanisme atau mata rantai politik dengan penurunan atau kenaikan Ketimpangan adalah sangat dekat : (a) seberapa jauh Presiden mengarahkan kebijakan Pajak; (b) seberapa jauh Presiden mengarahkan belanja sosial; (c) seberapa jauh dampak kebijakan pajak dan transfer itu signifikan menurunkan ketimpangan. Pada sisi lain, Presiden juga harus berani menolak dan mandiri dari berbagai kepentingan sempit kelompok Superkaya yang biasanya sangat berpengaruh dalam politik (*political capture*), antara lain : tidak memberikan kompensasi, fasilitas dan tax exemptions. kepada Superkaya. Solusi mengatasi Ketimpangan dapat didekati skema berikut ini>



Sumber: Penulis, 2014

Pada sisi manfaat, menurunkan ketimpangan akan mengalirkan manfaat yang besar bagi Indonesia tidak saja bagi kaum elit tetapi juga bagi warganegara. (1) pertumbuhan ekonomi akan semakin berkelanjutan dan semakin dinikmati oleh semua warga dan semua lapisan masyarakat; tidak hanya oleh “kelompok Menteng” dan “Pondok Indah” (artis, politisi, pejabat dan pengusaha), (2) dukungan kepada pemerintah, demokrasi dan politik akan semakin besar, karena semua warga melihat manfaat pembangunan secara nyata. Menurunkan Ketimpangan juga akan menuai dampak non-material tetapi sangat besar untuk penguatan kerukunan warga, kohesi sosial dan stabilitas masyarakat serta identitas Indonesia yaitu (3) mencegah dan menetralsir radikalisme agama yang kini telah merusak kerukunan dan gotong-royong Indonesia, (4) memperkuat sentimen solidaritas antar penduduk di semua wilayah NKRI, sehingga secara langsung ikut memperkuat kesatuan Indonesia.

Lagipula, menurunkan Ketimpangan bukanlah “mission impossible”, atau soal teknologi tinggi yang tidak terjangkau Indonesia, seperti teknologi tinggi peluncuran pesawat ulang alik ke ruang angkasa. Dengan kata lain, yang diperlukan adalah kemauan politik dan kecerdasan menggunakan pengalaman Indonesia sendiri dan pengalaman negara-negara lain, agar Indonesia dapat menemukan jalan keluar yang cocok.

Pengalaman pembangunan Indonesia di bawah Widjojo Nitisastro periode 1970an dapat menjadi rujukan bagi masa kini Indonesia yang melakukan intervensi besaran-besaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Periode 1970an telah terbukti melahirkan penduduk Indonesia yang sehat dan terdidik. Pada tingkat sektoral, pengalaman BRI ketika aktif dalam menumbuhkan pengusaha mikro dan menengah di berbagai pelosok wilayah Indonesia dapat diulangi untuk memperluas tumbuhnya lapisan pengusaha menengah di berbagai kota di Indonesia. Kebijakan industri yang mendukung kemampuan dan kapasitas industri lokal dan nasional yang pernah dilakukan, juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia kepada barang jadi impor, sehingga mengurangi defisit neraca pembayaran yang terus menerus terjadi selama 10 tahun ini.

Pengalaman negara lain seperti Brasil kiranya layak dicermati. Dibawah presiden Luiz Inacio Lula, Brasil diakui telah berhasil menurunkan Ketimpangan. Brasil dengan program “Zero Hunger”, *Bolsa Familia* dan peningkatan upah minimum serta Jaminan kesehatan universal telah terbukti menurunkan Ketimpangan dan mengalirkan dukungan kepada pemerintah sehingga terpilih untuk kedua kalinya.

Menyimak pengalaman negara-negara maju dengan tingkat ketimpangan yang rendah seperti Swedia dan negara-negara Skandinavia, tiga pelajaran utama adalah: peran pemerintah, peran pemerintah dan peran pemerintah. Dengan kata lain, peran pemerintah yang aktif dan kuat untuk mengimbang dan mengoreksi berbagai kegagalan pasar (pasar kerja, pasar informasi, dll).

Intinya adalah, penurunan Ketimpangan menuntut pemerintah untuk mengurangi atau bahkan melepaskan kebijakan neoliberal yang terlalu menggantungkan nasib warganegara kepada pasang-surut pasar dan tetesan rejeki dari pertumbuhan ekonomi. Karena bakat tiap individu tidak sama dan kesempatan sosial ekonomi semua warga tidaklah setara. Karena tidak semua barang dan jasa dapat diperlakukan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan (air minum, kesehatan, pendidikan, udara bersih dan lingkungan hidup, toleransi, nondiskriminasi).

Peran pemerintah dan peran politik (politik yang baik) penting untuk membedakan dan mengatur mana yang merupakan hak dan barang publik (*you get what you need*), yang harus dibela dan dilindungi pemerintah dengan seluruh kuasa dan kelebagaanya, dan mana yang merupakan komoditi dan privatisasi yang didasarkan pada hukum pasar bebas (*you get what you pay*) - Lihat Box 1 Para Pemenang Mengambil Semua Kue

PARA PEMENANG MENGAMBIL SEMUA KUE:

ANALISA POLITIK MENGENAI KETIMPANGAN di AMERIKA SERIKAT

Jacob S. Hacker dari Universitas Yale dan Paul Pierson, Universitas California, Berkeley dalam kajiannya *Winner-Take-All Politic: How Washington Made the Rich Richer and Turn Its Back on the Middle Class (2010)*, atau WTAP, menemukan bahwa tingkat Ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir di AS sangat ditentukan oleh kebijakan *Pemerintah Federal dan politik* di Washington.

Ada tiga gejala kunci yang diselidiki oleh Hacker dan Pierson: (i) mengapa dan bagaimana *hiper-konsentrasi pendapatan terjadi*; (ii) mengapa dan bagaimana hiper-konsentrasi itu terjadi *terus menerus*; (iii) bagaimana *Tunjangan sosial minimal kepada kelompok nonkaya terjadi*

Berbeda dari analisa lain, Hacker dan Pierson menemukan bahwa penyebabnya bukan saja perubahan teknologi (tenaga kerja diganti mesin dan komputer). Faktor utamanya adalah (i) pemerintah berperan minimal (*doing much less*) dalam hal Pajak dan Tunjangan kepada lapisan superkaya (*very top*); (ii) para pemimpin politik melalui berbagai UU dan regulasi membiarkan berbagai regulasi menjadi usang dan gagal mengatur ekonomi (sektor keuangan); (iii) pemerintah berperan minimal dalam regulasi pasar yang mempengaruhi pendapatan sebelum pajak (market income).

Secara konkrit, andil pemerintah dalam meluas-naiknya Ketimpangan digambarkan dalam buku WTAP adalah berikut:



Bagaimana peran parpol utama di sana? Baik Kubu Demokrat dan Republik sama-sama memiliki andil dalam meluasnya kesenjangan ekonomi. Berbagai perubahan kebijakan pemajakan (pemukoran pajak untuk superkaya dan 1% terkaya) didukung oleh kedua kubu yang memerintah. Dilihat dari sisi besaran pengaruh antara dua parpol di sana – Republik dan Demokrat, maka dominasi republik sangat nyata dan signifikan.

Sementara Kubu Republik terus menerus meningkatkan kapasitas organisasinya untuk mempengaruhi kebijakan melalui kelompok lobby bisnis dan think tanks, Kubu Demokrat semakin lama semakin menggantungkan keuangannya kepada perusahaan-perusahaan Keuangan seperti para CEO, manager dan pialang saham di Wall Street.

Data-data yang dikumpulkan oleh Hacker dan Pierson memperlihatkan pertumbuhan pendapatan yang pincang/timpang selama periode 1979 hingga 2006 di antara lapisan penduduk. Sementara Lapisan 1% terkaya melejit naik, kelompok termiskin mengalami kemandegan dan bahkan penurunan. Jika pertumbuhan merata, maka kelompok terbawah pun juga akan menjadi lebih baik/lebih kaya.

Pertumbuhan Timpang (Richistan) Vs Pertumbuhan Untuk Semua (Broadland)

(WTAP-, Hacker dan Pierson, 2010 hal 25)

	Pertumbuhan Timpang (Richistan, pertumbuhan nyata 2006) US \$	Pertumbuhan untuk Semua (Broadland, jika semua kelompok mengalami pertumbuhan pendapatan antara 1979 dan 2006) US \$	Lebih kaya atau miskin dalam Broadland 2006?
Lapisan 5 terbawah	16.500	22,366	5,866 (lebih kaya)
Lapisan 5 kedua terbawah	35.400	45,181	9,781 (lebih kaya)
Lapisan Tengah	52.000	64,395	12,295 (lebih kaya)
Lapisan Ketiga	73.000	84,209	10,409 (lebih kaya)
Lapisan ke80-90	100.915	106,696	5,781 (lebih kaya)
Lapisan 90-95	132,258	128,714	3,544 (lebih miskin)
Lapisan 95-99	211,768	181,992	29,776 (lebih miskin)
Lapisan 1% Tertinggi/Terkaya	1,200,300	506,002	694,298 (lebih miskin)

Tiga Skenario : Menurunkan Ketimpangan

Ketimpangan mencakup wilayah yang cukup luas. Mulai kebijakan **fiskal** dan **pajak** hingga **pelayanan publik**. Masalah soal kasus Pertanahan/konflik agraria hingga kesulitan warga memperoleh rumah murah dan sederhana di kota besar seperti Jakarta. Mulai dari kasus-kasus **korupsi** skala kakap hingga **kualitas birokrasi** di pusat dan daerah.

Skenario pertama. pemerintah lebih berfokus kepada penguatan *kelembagaan* dan akuntabilitas data dan kelembagaan/operasional. Dengan tujuan memperbaiki kapasitas, kualitas dan kinerja. Misalnya saja, pemerintah memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sejalan dengan UU baru (ASN 2013), memastikan dan mempercepat pelaksanaan JKN-BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, memperkuat lembaga pemantauan dan kinerja pemerintah seperti KPK, UKP4, BPK dan BPKP. Dan merombak dan memperkuat Dirjen Pajak, BPN dan BPS dan LIPI.

Skenario kedua. disamping memperkuat kapasitas kelembagaan, pemerintah secara bersamaan melaksanakan perubahan kebijakan, misalnya saja : perubahan kebijakan BI (menurunkan suku bunga), regulasi kepada sektor keuangan, perubahan kebijakan Pajak, Upah minimum dan Tunjangan Pengangguran, realokasi dana Subsidi BBM dan perubahan subsidi Pupuk, dan Pengembangan Aset bagi

penduduk seperti Tanah dan perumahan, dukungan pemerintah untuk perluasan koperasi, dan sektor ekonomi kecil dan menengah.

Skenario ketiga, pemerintah melaksanakan tiga elemen sekaligus yaitu, perubahan kebijakan, kelembagaan dan akuntabilitas. Pada pilihan ini, pemerintah harus berani melakukan investasi dalam bentuk intensifikasi kegiatan-kegiatan pemantauan dan pendataan yang selama ini diabaikan atau kurang dilakukan. Pemerintah misalnya dapat memperluas dan memperkuat UKP4 agar kendala dan rintangan di lapangan segera dapat dipecahkan. Pemerintah dapat memperkuat BPN, BPS, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, LIPI, universitas serta lembaga lain.

Apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Sejalan dengan pengalaman Indonesia sendiri, pengalaman negara-negara maju dan berbagai kajian dan temuan perihal Ketimpangan di negara maju dan di Indonesia, berikut ini elemen-elemen perubahan kebijakan, kelembagaan dan akuntabilitas/operasional yang dapat menjadi pilihan-pilihan kebijakan oleh Capres dan Caleg. (Lihat Lampiran 4):

Pertama, peranan pemerintah dan kebijakan publik sungguh-sungguh mengarah kepada pemerataan dan redistributif, dan bukan sebaliknya. Langkah-langkahnya antara lain (i) Mengurangi konsentrasi pendapatan dan kekayaan pada kelompok terkaya antara lain melalui pajak dan pemberlakuan batas atas gaji dan bonus sektor keuangan (ii) Kebijakan fiskal terutama Pajak dapat menjadi wahana pemerintah seperti menata ulang subsidi BBM; perubahan subsidi secara tunai dan targeting ketimbang dalam bentuk barang dan memperluas akses keuangan untuk menaikkan skala usaha kecil dan menengah

Kedua, peranan pemerintah dapat optimal mengurangi ketimpangan pendapatan dari pasar kerja, antara lain dengan (i) perluasan dan peningkatan mutu pelayanan publik seperti pendidikan, tenaga kerja dan (ii) menaikkan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak bagi keluarga.

Ketiga, kebijakan dan langkah pemerintah memperluas aset (tanah dan perumahan) dan akses keuangan warga negara, misalnya dengan melakukan penataan pertanahan dan memberikan akses lahan kepada petani kecil dan buruh tani, memperluas akses keuangan kepada warganegara dan pengusaha mikro-menengah; **Keempat**, upaya pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah yang terkait langsung dengan pembangunan aset warga negara dan *mobilitas sosial*, misalnya BPN, BPS, Kementerian Perumahan dan Kementerian Tenaga kerja.

Target 5 tahun	Menurunkan Gini Rasio/Indek Gini dari 0.41 menjadi 0.35	
Jalur Intervensi	Penurunan Ketimpangan Pendapatan dan Aset Pemerataan Kesempatan (kesehatan, tenaga kerja, beasiswa, dll) Pemerataan Infrastruktur dan Energi untuk wilayah di luar Jawa	
Kebijakan	Kelembagaan	Akuntabilitas
=>Penurunan Ketimpangan/Gini Rasio menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam RPJM dan RKP 2015-2019 =>Menyeimbangkan Kebijakan BI, bukan hanya mencapai Inflasi rendah/stabilitas harga, tetapi juga mengurangi pengangguran =>Menaikkan perolehan	=> Penguatan sumberdaya dan personil lembaga seperti KPK, BPK, BPS dan UKP4 =>Penguatan dan Penataan BPN Tidak sekedar tertib administrasi. Penataan Tanah untuk lebih melindungi petani dan masyarakat adat =>Memastikan JKN (jaminan Kesehatan) berjalan dan diterima oleh semua penduduk Indonesia, termasuk Lansia, Difable dan Masyarakat adat	Pengadaan data-data baru a. Penyusunan Pelaporan Tahunan Indeks Gini b. Penyusunan Pelaporan Perkembangan Aset Warga c. Produksi Panel data baru: angka kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi pemerintah d. Pengadaan dan Pemutakhiran data Kesenjangan upah dan gaji antara laki dan perempuan e. Akses pendidikan dan kesehatan bagi laki dan perempuan f. Panel data Aset di semua

<p>Pajak hingga 19-24% PDB. Antara lain dengan Perubahan tarif pajak 45% bagi superkaya/1% (pendapatan diatas Rp. 5-10 M per tahun)</p> <p>=> Menaikkan besaran Belanja Sosial/Transfer setara dengan 5% PDB</p> <p>=>Realokasi Subsidi BBM. Perubahan tata cara Subsidi Pupuk dan Benih.</p> <p>=> Perluasan PKH menjadi Basic Income</p>	<p>=>Memastikan Persiapan Pelaksanaan BJKS Ketenagaakerjaan (Jaminan Pensiun, Kecelakaan Kerja, dll)</p> <p>=> Memastikan pelayanan publik di 400 kota dan Kab layak dan berkualitas</p> <p>a.Mematok batas maksimum 40% belanja birokrasi dan politik (DPRD/pemilu) di APBD</p> <p>b. Mematok batas Minimum belanja pendidikan, kesehatan dan airminum (30%) di APBD</p>	<p>keluarga Indonesia setiap dua tahun</p>
---	---	--

Lampiran 1

Tiga Cara Mengukur Ketimpangan

Nama	Metode
<ul style="list-style-type: none">• Gini Koefisien	Ketimpangan pada semua lapisan masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Ketimpangan <u>Maksimum</u> = semua pendapatan diterima 1 orang dan 99 lainnya tidak memperoleh apa-apa= Gini Rasio = 1• Ketimpangan <u>Minimum</u> = semua pendapatan diterima secara merata= Gini Rasio = 0
<ul style="list-style-type: none">• Rasio	Perbandingan antar lapisan pendapatan dalam masyarakat. Misalnya 20/20, yaitu perbandingan antara pendapatan 20% tertinggi dibandingkan 20% terendah Pengukuran Rasio yang biasa digunakan adalah: <ul style="list-style-type: none">• 50/10: Ketimpangan antara pendapatan menengah dengan terbawah dalam distribusi pendapatan• 90/10: ketimpangan antara yang tertinggi dengan terbawah• 90/50 : Ketimpangan antara yang tertinggi dengan menengah• 99/90: Ketimpangan antara pendapatan puncak dengan yang tertinggi
<ul style="list-style-type: none">• Palma Rasio	Mengukur porsi pendapatan 10% tertinggi dibanding dengan 40% terbawah Palma berusaha <u>mengoreksi</u> metode Gini yang (i) terlalu sensitif mencatat perubahan pada <u>lapisan Menengah</u> , dan (ii) kurang sensitif mencatat perubahan pada pendapatan <u>tertinggi dan terbawah</u> Dalam masyarakat yang lebih setara, indeks Palma akan berada pada angka 1 atau dibawahnya. Artinya, 10 % penduduk terkaya tidak menerima pendapatan yang lebih ketimbang yang 40% Sementara dalam masyarakat yang timpang, Indek Palma bisa melebar menjadi 7. Contohnya Inggris: 1.07. Brasil:2.23

Sumber <http://www.equalitytrust.org.uk/about-inequality/scale-and-trends>

Lampiran 2

Kajian Ketimpangan Indonesia

Penulis/Lembaga	Tahun	Temuan/Rekomendasi
SEADI Discussion Paper#17/Arief Anshory Yusuf dkk. "Evolution of Inequality in Indonesia 1990-2012"	2013	<ul style="list-style-type: none">• Ketimpangan pendapatan naik secara signifikan pada periode 1990-2012• Selama 10 tahun terakhir perubahan sangat drastis• Konvergensi ketimpangan antara propinsi terjadi tetapi bukan antar wilayah
Hamong Santono "Ketimpangan dan Implikasinya Bagi Pembangunan Indonesia"	2013	<ul style="list-style-type: none">• Ketimpangan pendapatan perlu menjadi agenda prioritas• Ketimpangan dapat merintang hasil pembangunan
Dwi Rubyanti Kholifah "Ada apa dengan Ketimpangan"	2013	<ul style="list-style-type: none">• Ketimpangan nonpendapatan penting menjadi agenda pembangunan ke depan• Ketimpangan gender merupakan kunci dari kendala pembangunan di Indonesia• Agenda penelitian ke depan
Andy Sumner, Asep Suryahadi and Nguyen Thang "Poverty and Inequality in Middle Income countries In SouthEast Asia"	2012	<ul style="list-style-type: none">• Kantong Kemiskinan terbesar di negara menengah seperti Indonesia dan Vietnam, bukan di negara low income

Lampiran 3

Kajian Ketimpangan Internasional/Negara Lain

Penulis/Lembaga	Tahun	Temuan/Rekomendasi
1. "Humanity Divided" Confronting Inequality in Developing Country" UNDP	2013	Ketimpangan yang tinggi melemahkan kemajuan ekonomi, kehidupan demokrasi dan kohesi social. Selama 20 th, ketimpangan telah meningkat. Pada 1990-2010, ketimpangan pendapatan telah meningkat 11% di negara berkembang
2. "Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising" - OECD	2011	Gap antara 10% terkaya dengan 10% termiskin semakin melebar di negara-negara anggota OECD
3. Nancy Birdsall "Income distribution: Effect on Growth and Development"	2007	Korelasi negatif terjadi pada negara dengan pendapatan rendah (pendapatan per kapita di bawah \$ 3200 pada tahun 2000). Ketika tingkat Ketimpangan pada dan di atas 0.45 (Gini Rasio)
4. Paula Casal "Love not War: On the Chemistry of Good and Evil"	2011	Gajah, gorila <i>betina</i> memiliki sifat-sifat moral baik yang relevan dengan institusi manusia, yang tidak dimiliki oleh jenis jantan. jenis betina dikarunia hormon tertentu, yang disebut Oxcytosin – hormon peduli, empati, mencintai, melindungi, nonkekerasan.
5. Robert Putnam dkk "Growing Class Gaps in Social Connectedness among American Youth"	2012	Ketimpangan di antara kaum muda lebih ditentukan oleh kelas sosial ketimbang ras
6. Joseph Stiglitz "The Price of Inequality"	2012	Ketimpangan ekonomi di AS tidak lepas dari politik. Sistem politik dibajak elite keuangan
7. A.B. Atkinson "Reducing Income Inequalities in Europe"	2013	Perlu berpikir "out of the box" untuk menemukan solusi "Citizen Income" atau "Basic Income" perlu dipertimbangkan untuk zona EU.
8. Branco Milanovic "Why Income Inequality Is Here to Stay"	2013	Dua solusi untuk ketimpangan : Rawlsian yang menuntut perbaikan moderate atau Roemerian yang lebih radikal
9. Andrew G. Berg dan Jonathan D Ostry-IMF "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coins"	2011	Pertumbuhan ekonomi yang lebih panjang berkaiatan dengan distribusi pendapatan yang lebih merata
10. John Roemer "The Ideological Roots of inequality and What is to be done"	2011	Nozick meletakkan dasar-dasar pembenaran moral atas ketimpangan. Dua teori ekonomi memberi pembenaran atas ketimpangan (a) Rational expectation dan (b) hipotesa pasar yang efisien

Lampiran 4.

Contoh Usulan Kebijakan Menurunkan Ketimpangan

Penulis/Lembaga	Usulan Kebijakan/ Implikasi Kebijakan	Sumber
Eduardo Matarazzo Suplicy (2011). Senator Brasil, tokoh PT dan Ekonom	<ul style="list-style-type: none"> Bolsa Familia perlu diubah menjadi Jaminan Pendapatan Warga (Citizen Basic Income) 	"Toward An unconditional basic Income in Brazil"
Thomas Pikety dan Emmanuel Saez Paris School of Economy	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Warisan (inheritance tax) yang optimal untuk AS dan Prancis berkisar 50-60% atau lebih tinggi 	http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2013.pdf
Laura Tyson (2014) Penasihat Ekonomi Obama	<ul style="list-style-type: none"> Memperbesar dampak "tax and transfer" pemerintah Perluasan Jaminan Sosial Upah Minimum perlu di naikan 	http://www.project-syndicate.org/
Donald Kaberuka (2014) Presiden Africa Development Bank	<ul style="list-style-type: none"> Akses pendidikan universal untuk anak keluarga miskin Tunjangan Tunai ala Bolsa Familia, Basic Income ala Alaska 	http://www.project-syndicate.org
Dylan Matthew (2012) Wartawan Washington Post	<ul style="list-style-type: none"> 10 cara menurunkan Ketimpangan tanpa menaikkan Pajak, antara lain (i) memudahkan pekerja bergabung kepada serikat buruh; (ii) Bank Sentral mendukung pasokan Kredit 	http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2012/12/06/ten-ways-to-reduce-inequality-without-raising-tax-rates/
Bruce Ackerman (1999) Universitas Yale	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Tunai yang disebut stakeholding (Saham Warga) sebesar 80 ribu untuk penduduk usia 18 tahun 	The Stakeholder Society
Philippe Van Parijs (1995) Universitas Katolik Louvain-UCL	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Pendapatan Warga yang disebut sebagai "Basic Income", per bulan tanpa syarat untuk semua warga 	Real Freedom for All
A.B. Atkinson (2011) Universitas Oxford	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menyediakan Jaminan pendapatan untuk semua warga yang disebut sebagai "Participation Income" 	http://www.nuff.ox.ac.uk/users/atkinson/Basic_Income%20Luxembourg%20April%202011.pdf
George McGovern (1972) Calon Presiden kubu Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Pendapatan warga yang disebut "Demogrant" untuk semua sebesar 1000 dolar per bulan 	
James Tobin, Samuelson dan 1200 ekonom (1968)	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menyelenggarakan Jaminan Pendapatan (guaranteed minimum income) 	http://en.wikipedia.org/wiki/Guaranteed_minimum_income
Thomas Paine (1795)	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu memberikan tunjangan tunai untuk semua warga yang disebut "Citizend Dividend", per tahun 	"Agrarian Justice"
Khalifah Abubakar	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan pendapatan untuk semua penduduk termasuk perempuan dan anak (tiap tahun) 	http://en.wikipedia.org/wiki/Guaranteed_minimum_income

Lampiran 5

Survei Renumerasi (Gaji dan Benefits) Ceo Indonesia

Sumber: "Top 100-Rata-rata Remunerasi BOD (Direksi) Perusahaan Publik 2012." MAJALAH SWA 2013, hal 32-35.

Nama Perusahaan (2012)	Besaran/ jumlah direksi/tahun	Renumerasi per bulan
Astra International Tbk	Rp. 73 M 9 orang	Rp. 8,1 M
Indofood Sukses Makmur Tbk	Rp. 42 M 8 orang	Rp. 3,5 M
Telkom tbk	Rp. 31 M 8 orang	Rp. 2,6 M
BRI Tbk	Rp. 18.15 M 11 orang	Rp. 1,6 M
BCA Tbk	Rp. 19.43 M 10 orang	Rp. 1,9 M
Surya Citra Media Tbk	Rp. 17,46 M 2 orang	Rp. 8,73 M
HM Sampoerna Tbk	Rp. 9,13 M 7 orang	Rp. 1,3 M
Adaro Energy Tbk	Rp. 9,33 M 6 orang	Rp. 1,55 M
Medco Energi International	Rp. 8,77 M 5 orang	Rp. 1,7 M
Indika Energy Tbk	Rp. 6,78 M 7 orang	Rp. 968 juta
PP London Sumatra Tbk	Rp. 6,31 M 8 orang	Rp. 788 juta
Gudang Garam Tbk	Rp. 4,53 M 8 orang	Rp. 566 juta
Unilever Indonesia Tbk	Rp. 4,41 M 9 orang	Rp. 490 juta
Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Rp. 3,26 M 3 orang	Rp. 1,2 M

Lampiran 6

Daftar Lembaga yang Meneliti Ketimpangan

SUMBER ; <http://www.equalitytrust.org.uk/resources/links>

Inggris	Eropa	AS dan Kanada
<ul style="list-style-type: none"> • The Equality Trust interest group http://uk.groups.yahoo.com/group/EqualityTIG/ • Sheffield Equality Group http://www.sheffieldequalitytrust.org.uk/ • London Equality Group http://londonequality.org.uk/ • Action for Happiness http://www.actionforhappiness.org/ • Campaign for a Fair Society http://www.campaignforafairsociety.org/p/home.html • Centre for Welfare Reform http://www.centreforwelfarereform.org/ • Citizens Advice Bureau http://www.citizensadvice.org.uk/ • Economic and Social Data Rankings http://www.dataranking.com • Information on UK inequality statistics http://www.statistics.gov.uk/ci/nugget.asp?id=332 • Institute of Fiscal Studies http://www.ifs.org.uk/ • New Economics Foundation http://neweconomics.org/gen/ • Sustainable Development Commission http://www.sd-commission.org.uk/ • Public attitudes to economic 	<ul style="list-style-type: none"> • ECINEQ (Society for the Study of Economic Inequality) http://www.ecineq.org/ • Equalities Study Centre, University College, Dublin. http://www.ucd.ie/esc/index.html • Luxembourg Income Study (LIS) data on income distribution in different countries. http://www.lisproject.org/ • Polarization and Conflict http://www.polarizationandconflict.org/ • Observatoire des inégalités http://www.inegalites.fr/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dateline: powerful TV programme showing the reality of poverty & inequality in the USA http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/38363219#38363219 • Too Much: a commentary on excess and inequality http://toomuchonline.org/ • IPS Program on Inequality and the Common Good http://ips-dc.org/resources/EI-Year-End-Appeal.pdf • Bridging the income gap http://crofsblogs.typepad.com/gap/ • Class Action: building bridges across the class divide. http://www.classism.org/ • Explorations in Social Inequality http://www.trinity.edu/~mkearl/strat.html • Inequality.org http://www.demos.org/inequality/ • Population Health Forum http://depts.washington.edu/eqhlth/ • United for a Fair Economy http://www.faireconomy.org/ • Centre on Budget and Policy Priorities http://www.cbpp.org/pubs/povinc.htm

Inggris	Eropa	AS dan Kanada
<p>inequality http://www.jrf.org.uk/KNOWLEDGE/findings/socialpolicy/2097.asp</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Poverty Site for UK statistics on poverty and social exclusion. http://www.poverty.org.uk/ • Where do you fit in? http://www.ifs.org.uk/wheredoyoufitin/ • Wikipedia on measures of income inequality http://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_metrics • The Centre for Progressive Economics http://www.centreforprogressiveeconomics.com 		

Lampiran 7.

Perbedaan Antara Ketimpangan Dan Kemiskinan

Menjadi miskin berarti keadaan yang buruk dan parah untuk bisa hidup yang layak. Miskin berarti tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak (pendapatan, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan).

Kemiskinan bisa absolut dan bisa relatif tergantung ukuran kemiskinan. Kemiskinan absolut berarti keadaan paling parah yang tidak berubah. Sementara miskin relatif adalah ukuran yang bisa berubah-ubah. di Inggris, batas miskin adalah pendapatan keluarga kurang dari 60% rata-rata pendapatan (median income).

Sementara Ketimpangan akan selalu relatif, karena merujuk pada perbedaan atau selisih atau gap diantara lapisan pendapatan penduduk dan standar hidup, dalam rentang distribusi ekonomi dan nonekonomi.

Implikasinya, kemiskinan dan ketimpangan bisa naik dan turun bersama-sama, tetapi dapat saja berbeda dan tidak seiring. Misalnya (a) angka kemiskinan kecil (ekonominya kaya, atau kue ekonomi -PDB- besar), tetapi tingkat ketimpangan besar, karena terdapat perbedaan besar antara pendapatan tertinggi dibandingkan dengan pendapatan menengah dan pendapatan rendah; (b) bisa saja program penanggulangan kemiskinan berhasil, tetapi ketimpangan antar lapisan pendapatan dan golongan penduduk masih besar. Dengan kata lain, yang perlu ditemukan dan diperjuangkan adalah kebijakan dan program pemerintah yang sekaligus menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan.

Lampiran 8

Kebutuhan Data dan Statistik Indonesia yang sangat Dibutuhkan

Jenis Data	Informasi yang dihasilkan	Keterangan
1. <i>Statistik Pendapatan Indonesia (SPI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi pendapatan: -5 lapisan pendapatan, atau -10 lapisan pendapatan • Data Pendapatan Pasar (sebelum pajak) • Pendapatan Sesudah pajak • Tahunan • Cakupan : 10 tahun terakhir 	Status : <i>Data Baru</i> Sumber SPT Oleh Dirjen Pajak - Kemenkeu
2. <i>Statistik Kemiskinan Indonesia (SKI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan sebelum intervensi pemerintah • Angka kemiskinan sesudah intervensi pemerintah • Data Tahunan 	Status: Data baru/pemutakhiran Oleh BPS
3. <i>Laporan Pemantauan Kinerja Program (LPK Program)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dan dampak Subsidi Pupuk, BOS, PKH, JKN • Laporan tengah Tahunan dan Tahunan 	Status: Data Baru Oleh Bappenas, BPS, BPKP, BPK
4. <i>Statistik Tenaga Kerja Indonesia (STKI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pencari kerja di kalangan lapisan pencari kerja (lulusan PT dan SMA) • Lama waktu memperoleh kerja • Penggunaan waktu oleh penduduk pencari kerja • Data tahunan 	Status: Data Baru Oleh Kementrian Tenaga Kerja dan BPS
5. <i>Statistik Keuangan Warganegara (SKW)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses keuangan warga kpd lembaga keuangan dan nonkeuangan • Dua jenis data: <i>umum</i> kepada semua penduduk dan <i>khusus</i> kpd kelompok seperti nelayan, petani, ibu rumah tangga, lansia dan kelompok difable • Data Tahunan 	Status: Data Baru Oleh BPS dan BI

INFID adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1985 beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. INFID memiliki status sebagai lembaga nonprofit yang diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council* sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (*International Forum for National NGO Platform*) berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (<http://www.ong-ngo.org/en>) sejak 2009. INFID juga merupakan anggota *Executive Committee* dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org), sebuah jaringan CSO mutinasional dari negara-negara Utara dan Selatan yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan Pasca- 2015.



Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Fax : 021 78844703
e-mail : infid@infid.org, Facebook : infidjakarta, Twitter: @_infid_
website : www.infid.org